

Kebijakan Restorasi Bantuan Militer Amerika Serikat ke Mesir Tahun 2014-2015

Tjokorda Istri Adristy¹⁾, I Made Anom Wiranata²⁾, Putu Ratih Kumala Dewi³⁾

^{1,2,3)} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: adrisarthaputri09@gmail.com¹⁾, anom_wiranata@unud.ac.id²⁾,
ratihkumaladewi@unud.ac.id³⁾

ABSTRACT

United States has decided to cut off military aid to Egypt in 2013. The decision was made due to Egypt's political unstably that disgrace democratic and human rights values. Despite the fact that Egypt's domestic situation remained unstable, United States immediately decided to restore the aforementioned military aid to Egypt in 2014-2015. Reasons behind United States' military aid restoration in 2014-2015 will be explained by applying Neoclassical Realism theory in this research. Based on the applied theory, some findings appeared that the policy to restore military aid are dependent on two reasons. First, systemic stimuli in form of threats arise in international structure. Second, domestic factors such as leader, domestic institution, state-society relations, and strategic culture are the basis of United States to set a policy to counter the systemic stimuli. This research applies qualitative descriptive method.

Keywords: *United States of America, military aid, aid restoration policy, Neoclassical Realism*

1. PENDAHULUAN

Mesir merupakan negara yang secara konstan menjadi salah satu dari lima negara penerima bantuan luar negeri terbesar dari Amerika Serikat sejak tahun 1979. Bantuan yang Amerika Serikat berikan adalah dalam bentuk bantuan ekonomi dan bantuan militer. Jumlah bantuan militer yang diberikan Amerika Serikat ke Mesir sejak tahun 1979 rata-rata berjumlah 1,3 juta USD. Namun pada tahun 2013 bantuan menurun secara signifikan menjadi 1,2 juta USD, lalu pada 2014 terjadi kenaikan hingga menjadi 1,3 juta USD dan naik lagi pada 2015 (Hawthorne, 2016). Bahkan tahun 2015 menjadi tahun ketika Mesir menerima bantuan militer terbesar dari Amerika Serikat. Keputusan untuk mengurangi bantuan militer pada tahun 2013 diakibatkan oleh adanya perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh

militer Mesir terhadap Presiden Mohamed Morsi, presiden yang dipilih melalui pemilu (Hawthorne, 2016). Tidak dipungkiri, hal yang dilakukan militer Mesir dalam mengakhiri kekuasaan Morsi sebagai presiden yang terpilih secara demokratis merupakan bentuk pencederaan demokratisasi di Mesir.

Terkait kejadian tersebut, pada tanggal 3 Juli 2013, Obama menyampaikan pernyataan resmi yang berisi kecaman atas tindakan yang dilakukan oleh militer Mesir, dan mempertimbangkan pengurangan bantuan militer (The White House Office of the Press Secretary, 2013). Lalu, pada 9 Oktober 2013, Amerika Serikat mengambil keputusan untuk menghentikan bantuan militer hingga terjadi kemajuan menuju pemerintahan sipil yang dipilih secara demokratis melalui pemilu, serta adanya peningkatan angka penerapan hak asasi manusia di Mesir (Department

Spokesperson, Office of the Spokesperson, 2013). Keputusan tersebut didasarkan atas *Public Law 112-74 Consolidated Appropriations Act 2012 Section 7008 of United States of America* yang mengatur pengondisian bantuan luar negeri oleh Amerika Serikat sebagai negara donor jika terjadi kudeta di negara resipien. Amerika Serikat mengurangi bantuan dana sebesar USD 260 juta serta membatalkan pengiriman beberapa alutsista dalam skala besar.

Bantuan Amerika Serikat tersebut dikurangi agar memberi efek jera pada Mesir. Namun, ketika Al Sisi resmi menjabat sebagai presiden melalui pemilu dengan kemenangan mutlak sebesar 96,9%, keadaan demokrasi dan hak asasi manusia juga tak kunjung menunjukkan perbaikan. Pemerintahan sementara Mesir memberlakukan Undang-undang Demonstrasi yang semakin membatasi hak-hak sipil (Human Rights Watch, 2015). Selain itu, angka pelanggaran hak asasi manusia di Mesir juga tidak menunjukkan perbaikan pada tahun pertama Al Sisi menjabat. Hukuman mati telah diberlakukan kepada 683 anggota Ikhwanul Muslimin pada April 2014, dan banyak impunitas yang diberikan kepada hampir seluruh pelanggaran yang dilakukan oleh militer.

Kendati kondisi politik domestik, hak asasi manusia, dan demokrasi di Mesir tidak dalam keadaan baik, Amerika Serikat malah mengambil kebijakan untuk memberikan kembali bantuan militer kepada Mesir pada April 2014 yang sempat ditahan pada tahun 2013 lalu (Londoño, 2014). Lalu pada tanggal 31 Maret 2015, Amerika Serikat memutuskan untuk merestorasi seluruh bantuannya

kepada Mesir. Bahkan, tahun 2015 menjadi tahun ketika Mesir menerima bantuan militer dari Amerika Serikat dengan jumlah terbanyak.

Kemudian, penelitian ini akan membahas alasan Amerika Serikat tetap merestorasi bantuan militer pada tahun 2014-2015, terlepas dari fakta bahwa Mesir tidak mengindahkan syarat dari Amerika Serikat agar memperbaiki proses demokrasi, serta memperbaiki keadaan asasi manusia pada masa pemerintahan Al Sisi.

2. KAJIAN PUSTAKA

Artikel jurnal pertama yang digunakan adalah artikel yang ditulis oleh Rangga Amalul Akhli yang berjudul *"The Rapid Changes of the U.S. Foreign Military Assistance to Ukraine in 2019: A Neoclassical Realism Perspective"* yang membahas alasan Amerika Serikat menghentikan bantuan militer ke Ukraina pada Juli 2019, namun bantuan tersebut diberikan kembali pada September 2019. Pertama, pada struktur internasional, Amerika Serikat merasa perlu menjaga kepentingan serta perimbangan kekuasaan di Eropa Timur. Kedua, pada faktor domestik, terdapat benturan internal antara kepentingan politik Trump pada pemilu 2020 dengan institusi dalam negeri, serta adanya pengaruh budaya strategis Amerika Serikat yang menentang kebijakan penghentian bantuan militer tersebut.

Artikel jurnal yang ditulis Akhli (2020) mampu menunjukkan bahwa kebijakan suatu negara dapat berubah secara cepat karena dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal negara. Sehingga, artikel jurnal yang ditulis Akhli (2020) dapat membantu penelitian ini

dalam menggambarkan alasan kebijakan restorasi bantuan militer yang dilakukan secara cepat.

Artikel jurnal kedua yang digunakan adalah artikel yang ditulis oleh I.N. Sari dengan judul “Alasan Amerika Serikat Mencabut Sanksi Ekonomi Terhadap Myanmar”. Pada jurnal tersebut dijabarkan alasan yang melandasi Amerika Serikat dalam menghentikan sanksi ekonomi yang dijatuhkan ke Myanmar. Dapat dikatakan bahwa alasan sanksi ekonomi tersebut dihentikan karena Myanmar telah mematuhi syarat-syarat yang diberikan Amerika Serikat agar sanksi ekonomi dihapus, seperti memperbaiki kondisi hak asasi manusia dan meningkatkan praktik demokrasi. Hingga akhirnya pada 2016 Barack Obama mencabut semua sanksi ekonomi yang dijatuhkan terhadap Myanmar.

Artikel jurnal ketiga yang digunakan adalah artikel dengan judul “*The Lifting of the Trade Embargo Between the United States and Vietnam: The Loss of a Potential Bargaining Tool or a Means of Fostering Cooperation?*” yang ditulis oleh B. Castelli. Artikel jurnal ini membahas alasan penghapusan embargo Amerika Serikat terhadap Vietnam. Pertama, terjadi reformasi politik yang mengakibatkan rezim Partai Komunis kehilangan kekuatan di Vietnam. Kedua, terjadi reformasi ekonomi ke arah yang lebih terbuka dengan perdagangan luar negeri.

Artikel yang ditulis oleh Sari (2019) dan Castelli (1995) sama-sama memaparkan fenomena bahwa sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh sebuah negara kepada negara lain dapat dihapus atau dicabut

karena beberapa pertimbangan, dan kedua penelitian tersebut membahas alasan penghapusan sanksi yang didasari oleh kepentingan nasional negara pemberi sanksi. Untuk itu, kedua artikel jurnal tersebut membantu Penulis untuk melihat bahwa kebijakan yang dibentuk sebuah negara dapat dicabut dan atau diterapkan kembali ke negara lain dengan beberapa pertimbangan, salah satunya adalah kepentingan nasional.

Teori Realisme Neoklasik

Alasan Amerika Serikat merestorasi bantuan militer ke Mesir tahun 2014-2015 akan dibahas dari perspektif realisme neoklasik. Menurut Ripsman, et al. (2016) teori realisme neoklasik hendak memberikan penjelasan logis untuk menjabarkan politik dan kebijakan luar negeri sebuah negara berdasarkan dua aspek utama. Pertama, rangsangan sistemik yang muncul dalam struktur internasional. Sistem internasional dalam konsepsi realisme neoklasik menurut Ripsman, et al. (2016) dilihat sebagai sistem antarnegara, yang mana negara berkekuatan besar menjadi aktor paling berpengaruh secara politik dengan melihat kekuatan relatifnya. Aktor yang berada dalam struktur akan melihat politik internasional sebagai perjuangan tanpa akhir untuk mendapatkan kekuasaan dan pengaruh atas aktor lain.

Struktur internasional dijelaskan berdasarkan *strategic environment* dan *level of clarity*. *Strategic environment* atau lingkungan strategis melihat dari besar dan dekatnya ancaman atau peluang yang dihadapi negara. Semakin dekat ancaman dan peluang menyebabkan ancaman semakin berbahaya, sehingga lingkungan strategis bersifat terbatas. Negara cenderung akan

melakukan penyeimbangan di dalam lingkungan tersebut. Di sisi lain, semakin jauh peluang dan ancaman, lingkungan strategis semakin bersifat terbuka atau permisif.

Selanjutnya adalah *clarity level* untuk mengukur sejauh mana sistem internasional memberikan informasi mengenai sifat ancaman atau peluang, waktu, serta kebijakan yang optimal sebagai respon terhadap ancaman atau peluang tersebut. Menurut Gaddis dan Walt dalam Akhli (2020), negara yang dianggap sebagai ancaman adalah negara yang menjadi pesaing, memiliki kemampuan besar dalam bidang militer dan ekonomi, serta memiliki rasa kedekatan sehingga mampu melakukan suatu tindakan dalam waktu singkat.

Kedua, aspek politik domestik. Terdapat empat faktor yang menyebabkan adanya gejolak dan dinamika yang terjadi di internal negara sehingga dapat memengaruhi respon negara terhadap rangsangan sistemik. Pertama, faktor pemimpin negara. Bagi realisme neoklasik, menyelidiki karakter dan susunan psikologis pemimpin negara sangatlah penting karena masing-masing memiliki nilai, keyakinan, dan citra yang memengaruhi interaksi mereka dengan pihak lain.

Faktor selanjutnya adalah institusi dalam negeri. Menurut Ripsman, et al. (2016) faktor ini digunakan untuk memahami struktur kelembagaan negara yang menentukan siapa saja pihak yang dapat berkontribusi dalam pembentukan kebijakan, lalu pada tahap apa, dan siapa yang memiliki kuasa secara mutlak untuk membatalkan dan membentuk kembali kebijakan pemerintah.

Faktor berikutnya adalah hubungan antara negara dan masyarakat. Faktor ini mendorong peneliti untuk menyelidiki interaksi antara lembaga tinggi negara dengan berbagai kelompok masyarakat, dalam artian melihat jika opini masyarakat mampu memengaruhi kebijakan yang dibentuk oleh negara atau tidak.

Faktor yang terakhir adalah budaya strategis sebagai strategi yang dimiliki sebuah negara yang berdasar pada sejarah, geografi, budaya politik, hingga sikap dan pola perilaku aktor domestik yang memiliki pengaruh kuat di dalam negara. Budaya strategis yang dimiliki sebuah negara akan memengaruhi agenda kebijakannya.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer dan sebagian besar adalah data sekunder. Unit analisis dalam penelitian ini adalah negara. Amerika Serikat sebagai sebuah negara akan diteliti terkait dengan alasannya dalam merestorasi bantuan militer ke Mesir tahun 2014-2015. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah studi dokumen. Data yang didapatkan kemudian diproses dan dianalisis menggunakan teknik *coding*. Lalu data disajikan dalam bentuk teks naratif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keputusan Amerika Serikat untuk mengurangi bantuan militer ke Mesir pada tahun 2013 mengakibatkan munculnya tindakan dari sejumlah negara-negara berkekuatan besar yang juga memiliki kepentingan di Mesir. Negara-negara

berkekuatan besar lainnya melihat bahwa keputusan Amerika Serikat tersebut merupakan kesempatan yang harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dalam rangka mencapai kepentingan nasional. Negara-negara yang memanfaatkan keputusan Amerika Serikat tersebut adalah Rusia dan Tiongkok (Bodansky, 2020).

Hal pertama yang Rusia lakukan setelah Amerika Serikat resmi mengumumkan penghentian bantuan militer adalah mengirimkan wakil diplomatik ke Mesir untuk melaksanakan pertemuan. Pertemuan tersebut sekaligus menjadi kunjungan pertama Rusia setelah renggangnya hubungan diplomatik Rusia-Mesir pada tahun 1970-an (Arrott, 2013). Setelah beberapa pertemuan dilaksanakan, mulai terlihat signifikansi hubungan bilateral Rusia dan Mesir di berbagai bidang, terutama bidang militer, pertahanan, dan keamanan.

Pertama, bidang militer dan pertahanan. Dari segi perdagangan senjata, Mesir sepakat untuk membeli alutsista dari Rusia senilai 2-3 miliar USD (Kam & Magen, 2014; Marcus, 2014; Schenker & Trager, 2014; United Press International, 2014; Vasilyev, et al., 2015). Selain itu terdapat peningkatan peran Rusia sebagai eksportir senjata untuk Mesir dan kawasan MENA (*Middle East and North Africa*) secara lebih luas. Penjualan senjata Rusia ke kawasan MENA meningkat sebesar 19% dari tahun fiskal 2009-2013 ke tahun fiskal 2014-2018. Bahkan, pada tahun fiskal 2014-2018, total ekspor senjata Rusia ke kawasan MENA sebesar 37% dari total keseluruhan ekspor Rusia ke kawasan lainnya. Lalu, pada tahun fiskal 2014-2018, negara di kawasan MENA yang menjadi

tujuan utama ekspor senjata Rusia adalah Mesir, dengan jumlah 46% dari total ekspor keseluruhan Rusia ke negara-negara di kawasan MENA (Wezeman, et al., 2019). Selanjutnya, ekspor senjata Rusia ke Mesir pada tahun 2013 dengan jumlah 27 juta ke 2014 dengan jumlah 110 juta meningkat drastis sebanyak 307%. Angka tersebut malah berbanding terbalik dengan ekspor senjata Amerika Serikat ke Mesir, yakni terjadi penurunan yang cukup drastis sebesar 63%, dari 492 juta pada tahun 2013 menjadi 182 pada tahun 2014 (Stockholm International Peace Research Institute, 2021).

Peningkatan perdagangan senjata yang signifikan berdasarkan data di atas memperkuat asumsi bahwa Rusia sedang bertindak untuk memperkuat posisinya kembali sebagai mitra kerja sama militer dan perdagangan senjata secara luas di kawasan MENA dan secara khusus di Mesir dengan memanfaatkan penurunan peran Amerika Serikat sebagai eksportir senjata untuk Mesir. Lalu, Rusia dan Mesir juga memperkuat hubungan militer dan pertahanan dengan menyelenggarakan beberapa latihan militer gabungan.

Kedua, bidang ekonomi. Rusia dan Mesir melakukan perdagangan dengan nilai lebih dari 4,5 miliar USD pada tahun 2014, yang menurut Presiden Putin, nilai tersebut naik 80% dari tahun sebelumnya (Wilson, 2015). Rusia merupakan pemasok utama komoditas gandum Mesir, yakni sebesar 40% dari total impor gandum Mesir (Masriya, 2015). Pada tahun 2012-2013 nilai perdagangan gandum Rusia menurun drastis dari 4,26 miliar USD ke 2,14 miliar USD. Namun, pada tahun 2013-2014, nilai perdagangan meningkat hingga

4,5 miliar USD (Vasilyev, et al., 2015). Bahkan, ketika ketika Presiden Al-Sisi dan Menteri Industri, Perdagangan, dan Investasi Mesir, Mounir Fakhry Abdel Nour, mengunjungi Rusia pada tahun 2014, terdapat pembahasan terkait dengan adanya kemungkinan peningkatan suplai gandum dan biji-bijian ke Mesir sebanyak 5 hingga 5,5 juta ton (Vasilyev, et al., 2015). Pembahasan lain adalah Mesir akan meningkatkan suplai hasil pertanian seperti kentang, bawang merah, bawang putih, dan jeruk sebesar 30% (Anishchuk, 2014).

Selanjutnya, Rusia dan Mesir telah menandatangani beberapa perjanjian kerja sama komoditas gas alam cair pada tahun 2015. Seperti yang disampaikan Menteri Energi Rusia, Alexander Novak, bahwa pada bulan Maret 2015, Gazprom Global LNG Limited, perusahaan Rusia yang bergerak di bidang industri gas alam, dan Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS), perusahaan milik negara Mesir yang juga bergerak di bidang gas alam, sudah menyetujui perjanjian bahwa Gazprom Global LNG Limited akan menyuplai gas alam cair ke Mesir selama 5 tahun (Demyanchuk, 2015). Dalam perjanjian tersebut, disepakati bahwa 1 juta ton gas alam cair akan disuplai ke Mesir dalam 7 kali pengiriman setiap tahunnya hingga 2019 (Lenta.ru, 2015). Selain itu, perjanjian terkait pengiriman gas alam cair juga disepakati Rosneft Trading S.A., perusahaan Rusia yang juga bergerak di bidang gas alam dan EGAS pada bulan Juli 2015. Menurut Menteri Sumber Daya Minyak Bumi dan Mineral Mesir, Khalid Abd al-Badi, perjanjian tersebut berisi tentang kesepakatan bahwa Rosneft Trading S.A. akan menyuplai

gas alam cair ke Mesir dengan total 3,5 hingga 3,7 juta ton dalam 2 tahun (Lenta.ru, 2015).

Selain itu, Rusia dan Mesir juga menjalin kerja sama di bidang energi nuklir. Pemerintah Mesir sendiri memang memprioritaskan pembangunan proyek berskala besar, salah satunya adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di Al Dabaa yang merupakan situs riset pembangkit listrik tenaga nuklir di Mesir. Kerja sama pembangunan reaktor nuklir ini menjadi kerja sama terbesar yang disepakati Rusia dan Mesir pada kurun waktu 2014-2015 secara spesifik, dan sepanjang hubungan diplomatik Rusia dan Mesir secara lebih luas. Rencana pembangunan proyek ini diumumkan oleh Presiden Putin dan Presiden Al-Sisi pada 10 Februari 2015 (Republika, 2015). Proyek ini akan mengikat Rusia dan Mesir untuk tetap menjalin kerja sama hingga 80 tahun kedepan (Madkour, 2017). Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat dari sisi politis bahwa dalam kurun waktu tersebut, kerja sama dan kesepakatan akan terbuka lebar antara Rusia dan Mesir.

Tiongkok juga salah satu negara yang melihat adanya kesempatan dari keputusan Amerika Serikat untuk mengurangi bantuan militer ke Mesir. Tiongkok yang merupakan pemain baru dan sedang membangun kekuatannya di kawasan MENA, memanfaatkan keputusan Amerika Serikat tersebut untuk masuk ke Mesir dengan lebih mudah. Tidak seperti Rusia yang mengutamakan upaya peningkatan hubungan pada bidang militer, pertahanan, dan keamanan dengan Mesir, Tiongkok mengutamakan upaya peningkatan pada

bidang ekonomi, bukan mengutamakan upaya yang didasarkan pada bidang militer dan keamanan (Marks, 2020). Hal tersebut dikarenakan bahwa kekuatan militer Tiongkok belum cukup kuat di luar Tiongkok, dan kapasitas militer Tiongkok masih belum menguntungkan baginya untuk bersaing dengan Amerika Serikat yang tidak lain adalah pemain lama di Mesir dan kawasan MENA.

Tiongkok memproyeksikan bahwa ia masih belum mampu menggeser posisi Amerika Serikat jika mengandalkan kekuatan militer terlebih dahulu. Untuk itu, Tiongkok secara hati-hati menyusun strategi agar mampu meraih posisi yang menguntungkan baginya untuk dapat bersaing dengan Amerika Serikat, dan kekuatan terbesar yang Tiongkok miliki adalah pada kekuatan ekonomi. Setelah posisi Tiongkok lebih menguat di Mesir karena mengandalkan kekuatan ekonomi, maka kesempatan untuk memperkuat posisi di bidang militer juga terbuka lebar. Salah satu manuver Tiongkok di bidang militer adalah adanya rencana pembangunan basis militer pertama di luar Tiongkok, dan memilih wilayah Afrika untuk menjadi basis militer pertama dengan mempertimbangkan faktor geostrategis. Selain itu, Tiongkok juga berencana untuk mengadakan latihan militer gabungan dengan Mesir dan juga negara-negara di kawasan MENA. Sehingga dapat disampaikan bahwa di balik kepentingan ekonomi, terdapat pula kepentingan militer, pertahanan, dan keamanan yang ingin dicapai Tiongkok di Mesir secara spesifik dan di kawasan MENA secara lebih luas.

Pada tahun 2014, Tiongkok dan Mesir meningkatkan hubungan bilateral mereka dibawah kerangka yang disebut "*comprehensive strategic partnership*". Bahkan, Presiden Xi Jinping menyatakan bahwa tahun 2014 dan 2015 merupakan tahun yang disebut "tahun persahabatan Tiongkok-Arab" dengan diupayakannya peningkatan hubungan bilateral dengan negara-negara Arab, terutama Mesir (Tiezzi, China's Egypt Opportunity, 2014). Setelah dilaksanakannya pertemuan secara intens pada 2014-2015, banyak kesepakatan yang dibentuk oleh Tiongkok dan Mesir.

Pertama, disepakatinya pembangunan mega proyek Mesir seperti pengembangan koridor Terusan Suez, serta perluasan dan pengembangan Kawasan Kerja Sama Ekonomi dan Perdagangan Suez Tiongkok-Mesir yang digadang-gadangkan akan menciptakan lebih dari 10.000 pekerjaan bagi warga lokal. Total investasi terhadap proyek ini adalah mencapai 2 triliun USD. Lalu disepakatinya pembangunan lembaga dan kantor administratif baru yang dibangun dan didanai sebesar 45 miliar USD oleh perusahaan milik Tiongkok, China State Construction Engineering Corporation. Kedua, disepatinya pemberian dana sebesar 1 miliar USD kepada Central Bank of Egypt dan 700 juta USD kepada National Bank of Egypt. Mesir begitu berusaha untuk meningkatkan nilai investasi Tiongkok di Mesir. Selain dari peningkatan kerja sama proyek-proyek yang telah disebutkan sebelumnya, usaha Mesir untuk meningkatkan nilai investasi juga dapat dilihat dari fakta bahwa Mesir menjadi negara pertama di Afrika yang bergabung dengan

Asian Infrastructure Investment Bank pada tahun 2015 (China Daily, 2016; Tiezzi, 2016).

Meningkatnya dominasi Tiongkok di Mesir dalam bidang ekonomi pada tahun 2014 dan 2015 tidak hanya dilihat dari meningkatnya investasi dan kerja sama yang disetujui, namun juga dapat dilihat dari nilai perdagangan antar kedua negara. Berdasarkan data terkait nilai impor yang didapat dari The Observatory of Economic Complexity (n.d.), nilai impor Mesir dari Tiongkok meningkat pada tahun 2013 hingga 2015, bahkan nilai impor Mesir dari Tiongkok menjadi yang tertinggi. Pada tahun 2013, nilai impor Mesir dari Tiongkok sebesar 8,53 miliar USD atau 11,7% dari total impor. Pada tahun 2014, nilai impor Mesir dari Tiongkok mulai mengalami kenaikan hingga nilai perdagangan adalah sebesar 10,5 miliar USD. Lalu, pada tahun 2015 juga meningkat cukup signifikan, sehingga nilai impor dari Tiongkok adalah 12 miliar USD.

Tren nilai impor Mesir dari Tiongkok tersebut berbanding terbalik dengan tren nilai impor Mesir dari Amerika Serikat, yang merupakan negara dengan nilai impor ke Mesir tertinggi kedua. Pada tahun 2013, nilai impor sebesar 5,44 miliar USD atau 7,45% dari total impor. Lalu pada tahun 2014, nilai impor dari Amerika Serikat meningkat sangat kecil, yakni 6,65 miliar USD. Namun, pada tahun 2015, nilai impor menurun cukup signifikan, yakni hingga 4,85 miliar USD.

Data diatas mendukung asumsi bahwa Tiongkok merupakan pemain utama dalam perdagangan Mesir, dan pasar domestik Mesir dikuasai oleh Tiongkok, bahkan menyaingi Amerika Serikat.

Meningkatnya kekuatan ekonomi Tiongkok di Mesir juga akan mempermudah Tiongkok untuk membentuk hubungan bilateral pada bidang militer dengan Mesir. Salah satu hal signifikan adalah adanya rencana untuk melaksanakan latihan militer gabungan Tiongkok-Mesir di Mediterania untuk pertama kalinya pada 2019 (Ahrum Online, 2019). Dalam bidang penjualan senjata, pada tahun fiskal 2014-2018, Tiongkok mulai menunjukkan kapasitasnya sebagai eksportir senjata terbesar ke-lima di dunia. Di bagian Afrika Utara, Tiongkok menjadi eksportir senjata terbesar ke-tiga, dengan jumlah 10% dari total impor (Wezeman, et al., 2019).

Berdasarkan perspektif realisme neoklasik, tindakan Amerika Serikat selanjutnya dalam menghadapi kehadiran Rusia dan Tiongkok di Mesir dapat dilihat dari level analisis struktur dengan memperhatikan rangsangan sistemik yang muncul berdasarkan *strategic environment* dan *clarity level*.

Sistem internasional dengan jelas dan cepat memberikan informasi bahwa kehadiran Rusia dan Tiongkok merupakan bentuk ancaman yang besar bagi kedudukan Amerika Serikat di Mesir, karena Rusia dan Tiongkok secara cepat menduduki posisi strategis pada bidang yang berbeda di Mesir. Hal tersebut menyebabkan ruang gerak Amerika Serikat di Mesir menjadi terbatas, sehingga dapat disampaikan bahwa ancaman yang dihadapi Amerika Serikat begitu besar.

Keputusan untuk merestorasi bantuan militer yang sempat ditahan menjadi keputusan yang paling rasional untuk mengembalikan kekuatan Amerika Serikat

yang sempat berkurang. Namun, kebijakan tersebut tidak serta-merta dibuat tanpa mengindahkan pertimbangan yang datang dari domestik Amerika Serikat.

Seperti yang disampaikan oleh Robert Putnam, yang dikutip dalam Rosyidin (2010), bahwa tanpa adanya resonansi politik domestik maka rangsangan sistemik tidak akan mempengaruhi kebijakan suatu negara. Sehingga, perubahan kebijakan luar negeri sebuah negara, dalam hal ini adalah restorasi bantuan militer yang dilakukan Amerika Serikat dalam kurun waktu yang cukup singkat, harus dijelaskan dengan mengombinasikan alasan yang timbul dari sistem internasional dan alasan yang timbul dari faktor domestik.

Faktor pertama yaitu pemimpin negara. Realisme neoklasik memandang bahwa karakter pemimpin negara merupakan salah satu dasar pembentukan kebijakan luar negeri suatu negara. Hal tersebut dikarenakan faktor kognitif yang dimiliki masing-masing kepala negara. Sehingga, informasi yang diterima dari rangsangan sistemik akan bias dan dipersonalisasi sesuai karakter kognitif masing-masing pemimpin negara. Hal tersebut juga akan mempengaruhi kebijakan yang mereka ambil.

Cara pandang Obama terhadap Islam sedikit banyak dipengaruhi oleh kehidupan pribadi Obama yang tumbuh dan besar di lingkungan multietnis dan dekat dengan Islam (The White House President Barack Obama, 2009). Lalu pada dasarnya, Obama memproyeksikan kebijakan luar negerinya dengan strategi yang ditekankan pada multilateralisme, namun di satu sisi juga tetap memosisikan Amerika Serikat sebagai

kekuatan utama dalam sistem internasional (Wenjing, 2016). Obama juga merupakan pemimpin yang menganut konsekuensialisme (Fabbrini & Yossef, 2015). Konsekuensialisme adalah aliran yang menekankan pentingnya dampak dari suatu hal untuk menilai baik atau buruknya hal tersebut. Konsekuensialisme berfokus pada pengambilan kebijakan yang paling memuaskan dan membahagiakan orang banyak (The Ethics Centre, 2016). Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa Obama merupakan seorang politisi yang tidak didasarkan pada ideologi, ia hanya tertarik dan berfokus pada hal-hal yang memiliki kemungkinan besar untuk berhasil. Konsekuensialisme terkadang menyebabkan Obama memiliki terlalu banyak pertimbangan hingga menjadi tidak konsisten dengan keputusan yang ia ambil.

Seperti halnya kebijakan terkait bantuan militer ke Mesir, ia melihat bahwa terdapat konsekuensi yang lebih terhadap kepentingan nasional Amerika Serikat jika ia tetap melakukan penghentian bantuan militer tersebut, namun di satu sisi ia melihat ada nilai yang harus dijunjung, yakni nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Untuk membuat kebijakan restorasi menjadi tidak bias dan tumpang tindih dengan nilai demokrasi dan hak asasi manusia yang dijaga, Obama tidak menyebutkan bahwa pergulatan politik yang terjadi ketika jabatan Morsi diturunkan dari kursi kepresidenan oleh militer Mesir sebagai peristiwa kudeta. Bahkan Kirkpatrick (2018) menyebutkan bahwa "*Obama decided not to decide. The administration made no determination about whether what happened on July 3 in Cairo was a military coup.*" Dengan tidak

menyebutkan peristiwa tersebut sebagai kudeta, maka bantuan militer akan lebih leluasa untuk diatur tanpa mengindahkan nilai demokrasi dan hak asasi manusia, karena yang menjadi fokus utama Obama adalah mempertahankan posisi dan kekuatan Amerika Serikat di Mesir.

Kedua, faktor institusi dalam negeri. Menurut pandangan realisme neoklasik, faktor ini digunakan untuk melihat proses pembentukan kebijakan luar negeri dengan melibatkan institusi terkait, berikut dengan pengaruh sistem kepartaian pada institusi tersebut. Institusi dalam negeri Amerika Serikat yang akan diamati adalah hubungan lembaga legislatif, yaitu kongres yang terbagi lagi menjadi *House of Representatives* (DPR) dan *Senate* (Senat), dan lembaga eksekutif, yaitu Presiden.

Hubungan presidensial-kongres dalam pembentukan kebijakan luar negeri dicirikan oleh empat pola, yaitu (Jentleson, 2014):

1. Pola *cooperation*, yaitu ketika kongres sepakat untuk menetapkan kebijakan yang umum dan terkoordinasi,
2. pola *constructive compromise*, ketika kedua lembaga mampu menjembatani konflik dan mencapai kebijakan yang lebih baik daripada sebelumnya,
3. pola *institutional competition*, ketika substansi kebijakan bukan menjadi fokus karena konflik antara hak prerogatif yang dimiliki lembaga eksekutif dan kekuatan pengawasan yang dimiliki kongres, dan
4. pola *confrontation*, ketika posisi kebijakan berada dalam konflik substansial dan terjadi ketegangan di antara kedua lembaga.

Ketika satu partai politik yang sama mengendalikan kepresidenan dan kongres, pola *cooperation* adalah pola yang dominan. Lalu, ketika situasi politik menunjukkan "*divided government*" dengan satu partai diwakili oleh presiden dan partai lain diwakili oleh kongres atau setidaknya salah satu dari lembaga baik itu senat maupun dewan perwakilan, maka pola yang dominan adalah pola *confrontation*. Namun tak terbatas pada pola *confrontation*, perbedaan pengaruh partai di dua lembaga pun juga bisa membentuk pola *cooperation* walaupun hanya dalam beberapa kebijakan saja.

Pada masa pemerintahan Obama, lembaga eksekutif dan lembaga legislatif dikuasai oleh dua partai yang berbeda. Badan eksekutif dikuasai oleh *Democratic Party*, dan dua lembaga pada legislatif sendiri juga dikuasai partai yang berbeda, yakni *Republican Party* pada DPR dan *Democratic Party* pada Senat. Dapat dikatakan bahwa *Democratic Party* adalah partai yang berkuasa pada pemerintahan Obama saat itu, sehingga pembentukan kebijakan di kongres kemungkinan besar akan sejalan dengan keputusan yang dibuat oleh presiden.

Keputusan untuk merestorasi bantuan militer ke Mesir tidak melewati proses yang alot, bahkan sebaliknya. Pertama, presiden mengajukan rencana pemberian kembali bantuan militer ke Mesir kepada DPR untuk dipertimbangkan. Selanjutnya, DPR akan menyisipkan rencana tersebut ke dalam rancangan undang-undang yang akhirnya disetujui dan disebut sebagai *Fiscal Year 2015 Omnibus Appropriations Bill*. Setelah rancangan undang-undang telah lolos di DPR, maka rancangan tersebut akan

dipertimbangkan di Senat. Setelah Senat menyetujui rancangan undang-undang tersebut pada 9 Desember 2014, rancangan tersebut diresmikan menjadi *Public Law 113-235* yang disetujui dan ditandatangani oleh Presiden, DPR, dan Senat pada 16 Desember 2014.

Perbedaan pengaruh partai pada lembaga legislatif dan eksekutif tidak membuat proses pengambilan kebijakan luar negeri menjadi panjang dan alot. Persamaan persepsi dan pandangan dari sebagian besar anggota kongres dan presiden dalam pengambilan kebijakan restorasi bantuan militer ke Mesir ini menunjukkan pola hubungan yang cenderung mengarah ke pola *cooperation* antara lembaga legislatif dan eksekutif. Hal tersebut sekaligus dipengaruhi oleh *Democratic Party* yang mendominasi politik Amerika Serikat pada masa pemerintahan Obama. Obama yang merupakan seorang *democrat*, memiliki kesempatan yang cukup besar untuk didukung oleh Kongres, terlebih *Democratic Party* juga menguasai Senat, sehingga kekuatan di Kongres cukup seimbang antara Senat dan DPR.

Faktor ketiga adalah faktor hubungan negara dan masyarakat, yaitu memahami interaksi institusi negara dengan berbagai kelompok masyarakat.

Presiden Obama gencar membentuk pemerintahan yang terbuka, namun beberapa urusan terkait kebijakan luar negeri yang krusial hanya akan melewati proses yang tertutup dan terbatas hanya pada institusi pemerintah, dengan sedikit bahkan sama sekali tidak mengindahkan opini publik. Seperti restorasi bantuan militer ke Mesir,

keputusan tersebut hanya melalui proses perundingan di lembaga legislatif dan eksekutif saja dan sama sekali tidak memberi ruang bagi pandangan dan opini publik untuk mempengaruhi kebijakan. Namun ternyata sebagian besar opini publik cenderung mendukung keputusan tersebut.

Faktor keempat yaitu faktor budaya strategis. Budaya strategis yang Amerika Serikat miliki bersifat kompleks. Dilihat dari segi ideologi, Amerika Serikat memiliki budaya strategis yang menekankan nilai-nilai liberal dan demokrasi sekaligus aktif dalam mempromosikan nilai-nilai tersebut. Dari segi pertahanan dan keamanan, Amerika Serikat memiliki budaya sentimen terhadap terorisme yang mengancam kedaulatan Amerika Serikat dan mengancam stabilitas keamanan dunia.

Kompleksitas budaya strategis Amerika Serikat juga memengaruhi agenda kebijakan Amerika Serikat di Mesir. Di satu sisi, Amerika Serikat memiliki agenda dalam bentuk promosi nilai-nilai liberal, demokrasi dan hak asasi manusia. Agenda kebijakan yang dilandasi oleh budaya strategis tersebut dapat dilihat pada keputusan Amerika Serikat untuk menghentikan bantuan militer karena terjadinya kasus penggulingan Presiden Morsi oleh militer Mesir yang mencederai nilai yang dijunjung Amerika Serikat.

Di sisi lain, Amerika Serikat juga memiliki agenda utama dalam bidang keamanan sejak 2001, yakni memerangi praktik terorisme yang mengancam kepentingan dan kedaulatan Amerika Serikat, serta stabilitas keamanan dunia. Agenda tersebut dilandasi oleh budaya strategis Amerika Serikat yaitu budaya sentimen terhadap terorisme dan ekstrimisme. Pada hubungan Amerika Serikat

dan Mesir, budaya strategis tersebut menjadi prioritas di atas budaya penegakan nilai liberal, demokrasi dan hak asasi manusia, sehingga Amerika Serikat mengubah kebijakan dan akhirnya memutuskan untuk merestorasi bantuan militer ke Mesir.

Mesir sejak lama telah menjadi mitra penting Amerika Serikat dalam bidang keamanan karena kekuatan penuh yang Mesir miliki atas Terusan Suez, dan juga posisi geografis Mesir yang berbatasan langsung dengan Israel, aliansi terbesar Amerika Serikat. Hal tersebut sangat penting bagi kemampuan Amerika Serikat dalam memproyeksikan kekuatannya di kawasan MENA.

Mesir juga memiliki peran yang dapat menguntungkan Amerika Serikat. Mesir merupakan penopang bagi stabilitas kawasan MENA. Di tengah kubu Iran dan Rusia serta meningkatnya operasi *Islamic State of Iraq and Levant* (ISIL) dan Hamas, Mesir tetap memproyeksikan kekuatannya untuk mendukung negara-negara sekuler di kawasan MENA yang berusaha untuk menghentikan penyebaran terorisme dan ekstrimisme yang mengatasnamakan Islam. Posisi Mesir yang juga sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di kawasan MENA dapat dimanfaatkan oleh Amerika Serikat untuk membangun dukungan publik dalam memerangi terorisme (Foreign Policy, n.d.).

Selain itu, hubungan Mesir dan Israel yang erat di bidang *counterterrorism*, seperti menahan ISIL di Sinai dan Hamas di Gaza, sangat menguntungkan agenda Amerika Serikat dalam memerangi terorisme dan ekstrimisme (Clingan, 2018). Untuk itu,

menjaga kemitraan Amerika Serikat dan Mesir sama saja dengan menjaga kemitraan Mesir dan Israel. Jika Amerika Serikat tetap memutuskan untuk menghentikan bantuan militer, maka kemitraan Mesir dapat dipastikan akan berubah arah ke Rusia seperti pada tahun 1970-an.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pemikiran realisme neoklasik, dasar pembentukan kebijakan luar negeri sebuah negara dilihat dari dua aspek utama, yakni sistem internasional dan domestik.

Sistem internasional dengan jelas dan cepat memberikan informasi bahwa kehadiran Rusia dan Tiongkok menjadi ancaman bagi kedudukan Amerika Serikat di Mesir. Rusia dengan cepat menjadi mitra alternatif untuk kerja sama militer dan perdagangan Mesir. Tiongkok juga dengan cepat menjadi mitra utama kerja sama ekonomi, investasi, dan perdagangan Mesir.

Menindaklanjuti ancaman tersebut, Amerika Serikat melakukan penyeimbangan kekuatan dengan merestorasi bantuan militer karena khawatir dengan posisi dan kekuatannya di Mesir yang bisa tergeser atau bahkan tergantikan oleh Rusia maupun Tiongkok. Kendati demikian, kebijakan restorasi juga melewati pertimbangan yang didasarkan pada aspek domestik.

Pada aspek domestik, terdapat empat faktor yang memengaruhi terbentuknya kebijakan restorasi bantuan militer. Pertama, faktor kognitif Presiden Obama melihat bahwa agama Islam secara umum bukan ancaman bagi Amerika Serikat. Selain itu, Obama merupakan presiden yang mendasari

kebijakannya dengan berfokus kepada konsekuensi dan hasil dari kebijakan yang dibentuk. Presiden Obama melihat kebijakan penghentian bantuan militer malah berdampak buruk bagi Amerika Serikat, bukan memberi efek jera kepada Mesir seperti yang diharapkan Amerika Serikat.

Kedua, perbedaan partai politik yang menguasai lembaga legislatif dan eksekutif tidak mempersulit pengambilan kebijakan restorasi bantuan militer karena adanya persamaan persepsi antara lembaga legislatif dan eksekutif terkait alasan pengambilan kebijakan restorasi.

Ketiga, dalam pengambilan kebijakan restorasi bantuan militer ke Mesir, pihak yang terlibat hanya lembaga legislatif dan eksekutif tanpa adanya pengaruh opini publik. Kendati demikian, sebagian besar opini publik cenderung mendukung keputusan restorasi tersebut.

Keempat, budaya strategis yang melandasi restorasi bantuan militer ke Mesir adalah sentimen Amerika Serikat terhadap terorisme dan kaum ekstrimis yang mengancam kedaulatan Amerika Serikat dan stabilitas keamanan dunia.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Ahram Online. (2019, August 21). *Egypt, China naval forces carry out joint military drills off Egypt's Mediterranean*. Retrieved from Ahramonline: <https://english.ahram.org.eg/News/344171.aspx>
- Akhli, R. A. (2020). The Rapid Changes of The U.S. Foreign Military Assistance to Ukraine in 2019: A Neoclassical Realism Perspective. *Jurnal Pertahanan Vol. 6 No. 2*, 174-189 <http://dx.doi.org/10.33172/jp.v6i2.789>.

- Anishchuk, A. (2014, August 12). *Russia to boost trade with Egypt after Western food ban*. Retrieved from Reuters: <https://www.reuters.com/article/uk-ukraine-crisis-russia-egypt/russia-to-boost-trade-with-egypt-after-western-food-ban-idUKKBN0GC1AF20140812>
- Arrott, E. (2013, November 14). *Delegasi Tingkat Tinggi Rusia Kunjungi Mesir*. Retrieved from VOA Indonesia: <https://www.voaindonesia.com/a/delegasi-rusia-kunjungi-mesir/1789919.html>
- Bodansky, Y. (2020, January 26). *The Three Countries Vying For Ultimate Power In The Middle East*. Retrieved from Oilprice.Com: <https://oilprice.com/Geopolitics/Middle-East/The-Three-Countries-Vying-For-Ultimate-Power-In-The-Middle-East.html>
- Castelli, B. (1995). The Lifting of the Trade Embargo Between the United States and Vietnam: The Loss of a Potential Bargaining Tool or a Means of Fostering Cooperation? *Penn State International Law Review: Vol. 13: No. 2, Article 5.*, 296-328. Retrieved from <http://elibrary.law.psu.edu/psilr/vol13/iss2/5>.
- China Daily. (2016, January 22). *Broad prospect for China-Egypt economic and trade cooperation*. Retrieved from China Daily: http://www.chinadaily.com.cn/world/2016-01/22/content_23204973.htm
- Clingan, B. (2018, July 31). *Commentary: The U.S. is right to restore aid to Egypt*. Retrieved from Reuters: <https://www.reuters.com/article/us-clingan-egypt-commentary/commentary-the-u-s-is-right-to-restore-aid-to-egypt-idUSKBN1KK1YE>
- Demyanchuk, A. (2015, September 4). *Gazprom will supply Egypt with 1 million tons of LNG annually for 5 years*. Retrieved from RIA Novosti: <https://ria.ru/20150904/1229075046.html>
- Department Spokesperson, Office of the Spokesperson. (2013, October 9).

- U.S. Assistance to Egypt : Press Statement by Jen Psaki. Retrieved from U.S. Department of State: <https://2009-2017.state.gov/r/pa/prs/ps/2013/10/215258.htm>
- Fabbrini, S., & Yossef, A. (2015). Obama's wavering: US foreign policy on the Egyptian crisis. *Contemporary Arab Affairs, Vol. 8, No. 1*, 65-80. <http://dx.doi.org/10.1080/17550912.2014.976404>.
- Foreign Policy. (n.d.). *Egypt and America: 5 Things You Need to Know*. Retrieved from Foreign Policy: <https://foreignpolicy.com/sponsored/egypt-and-america-5-things-you-need-to-know/>
- Hawthorne, A. (2016). *Rethinking U.S. Economic Aid to Egypt*. Washington, D.C.: The Project on Middle East Democracy (POMED).
- Human Rights Watch. (2015, June 8). *Egypt: Year of Abuses Under al-Sisi*. Retrieved from Human Rights Watch: <https://www.hrw.org/news/2015/06/08/egypt-year-abuses-under-al-sisi>
- Jentleson, B. W. (2014). *American Foreign Policy: The Dynamics of Choice in the 21st Century, Fifth Edition*. New York: W. W. Norton & Company, Inc.
- Kam, E., & Magen, Z. (2014). The New Contacts between Egypt and Russia: How Far Will They Go? *INSS Insight, No.552*, 1-4.
- Kirkpatrick, D. D. (2018, September). *That Time Obama Wouldn't Call a Coup a Coup*. Retrieved from The Atlantic: <https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2018/09/obama-egypt-coup/565733/>
- Lenta.ru. (2015, August 26). *Gazprom and Egyptian EGAS signed a contract for the supply of LNG*. Retrieved from Lenta.ru: <https://lenta.ru/news/2015/08/26/gazprom/>
- Lenta.ru. (2015, September 4). *Novak called the volume of annual LNG supplies to Egypt*. Retrieved from Lenta.ru: <https://lenta.ru/news/2015/09/04/gazprom1>
- Londoño, E. (2014, April 22). *U.S. to Partially Resume Military Aid to Egypt*. Retrieved from The Washington Post: https://www.washingtonpost.com/world/national-security/us-to-partially-resume-military-aid-to-egypt/2014/04/22/b25f68c6-ca91-11e3-93eb-6c0037dde2ad_story.html
- Madkour, M. (2017, December 27). *Details of 4 Dabaa Nuclear Power Plants contracts*. Retrieved from Egypt Today: <https://www.egypttoday.com/Article/1/38587/EXCLUSIVE-Details-of-4-Dabaa-Nuclear-Power-Plants-contracts>
- Marcus, J. (2014, February 13). *Sisi in Russia: Moscow's Egyptian gambit*. Retrieved from BBC: <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-26177792>
- Marks, J. (2020, September 15). *China's Pursuit of a "Strategic Fulcrum" in the Middle East*. Retrieved from Middle East Institute: <https://www.mei.edu/publications/chinas-pursuit-strategic-fulcrum-middle-east>
- Masriya, A. (2015, August 28). *Egypt's President Sisi Meets Russia's Putin for Fourth Time*. Retrieved from Egyptian Streets: <https://egyptianstreets.com/2015/08/28/egypts-president-sisi-meets-russias-putin-for-fourth-time/>
- Republika. (2015, February 11). *Rusia Bantu Mesir Bangun Pembangkit Listrik Nuklir*. Retrieved from Republika: <https://www.republika.co.id/berita/njl2ia/rusia-bantu-mesir-bangun-pembangkit-listrik-nuklir>
- Ripsman, N. M., Taliaferro, J. W., & Lobell, S. E. (2016). *Neoclassical Realist Theory of International Politics*. New York: Oxford University Press.
- Sari, I. N. (2019). Alasan Amerika Serikat Mencabut Sanksi Ekonomi Terhadap Myanmar. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Vol. 7, No. 1*, 467-480 ISSN 2477-2623.
- Savicheva, E. M. (2020). *Security Factor in the Middle East in Russian-Egyptian Relations (2014-2018)*. Ankara: Center for Middle Eastern Studies.

- Schenker, D., & Trager, E. (2014, March 4). *Egypt's Arms Deal with Russia: Potential Strategic Costs*. Retrieved from The Washington Institute for Near East Policy: <https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/egypts-arms-deal-russia-potential-strategic-costs>
- Stockholm International Peace Research Institute. (2021, August 14). *Importer/exporter TIV Tables*. Retrieved from Stockholm International Peace Research Institute Arms Transfers Database: <https://armstrade.sipri.org/armstrade/page/values.php>
- The Ethics Centre. (2016, February 15). *Ethics Explainer: Consequentialism*. Retrieved from The Ethics Centre: <https://ethics.org.au/ethics-explainer-consequentialism/>
- The Observatory of Economic Complexity. (n.d.). *Egypt Historical Data*. Retrieved from The Observatory of Economic Complexity: <https://oec.world/en/profile/country/egypt>
- The White House Office of the Press Secretary. (2013, July 3). *Statement by President Barack Obama on Egypt*. Retrieved from The White House Office of the Press Secretary: <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2013/07/03/statement-president-barack-obama-egypt>
- The White House President Barack Obama. (2009, June 4). *The President's Speech in Cairo: A New Beginning*. Retrieved from The White House President Barack Obama: <https://obamawhitehouse.archives.gov/issues/foreign-policy/presidents-speech-cairo-a-new-beginning>
- Tiezzi, S. (2014, December 24). *China's Egypt Opportunity*. Retrieved from The Diplomat: <https://thediplomat.com/2014/12/china-s-egypt-opportunity/>
- Tiezzi, S. (2015, September 9). *China, Egypt Consolidate Ties After Sisi's Attendance at Military Parade*. Retrieved from The Diplomat: <https://thediplomat.com/2015/09/china-egypt-consolidate-ties-after-sisis-attendance-at-military-parade/>
- Tiezzi, S. (2016, January 22). *Xi's Visit Cements Egypt's Place on the 'Belt and Road'*. Retrieved from The Diplomat: <https://thediplomat.com/2016/01/xi-visit-cements-egypts-place-on-the-belt-and-road/>
- United Press International. (2014, February 14). *Russia, Egypt sign \$3 billion aircraft, weapons deal*. Retrieved from United Press International: https://www.upi.com/Top_News/World-News/2014/02/14/Russia-Egypt-sign-3-billion-aircraft-weapons-deal/38391392383955/?ur3=1
- Vasilyev, A., Tkachenko, A., Korotaev, A., & Isaev, L. (2015). *Cooperation between the Russian Federation and the Arab Republic of Egypt: Opportunities and Constraints*. Moscow: Russian International Affairs Council.
- Walsh, D. (2018, July 26). *Despite Egypt's Dismal Human Rights Record, U.S. Restores Military Aid*. Retrieved from New York Times: <https://www.nytimes.com/2018/07/26/world/middleeast/egypt-human-rights-us-aid.html>
- Wenjing, Y. (2016, October 27). *Three Features of Obama's Foreign Policy and Their Implications for China*. Retrieved from China US Focus: <https://www.chinausfocus.com/foreign-policy/three-features-of-obamas-foreign-policy-and-their-implications-for-china>
- Wezeman, P. D., Fleurant, A., Kuimova, A., Tian, N., & Wezeman, S. T. (2019). *Trends in International Arms Transfers, 2018*. Solna: Stockholm International Peace Research Institute.
- Wilson, N. (2015, February 10). *Egypt and Russia strengthen economic ties with free trade zone after Vladimir Putin visits Cairo*. Retrieved from International Business Times: <https://www.ibtimes.co.uk/egypt-russia-strengthen-economic-ties-free-trade-zone-after-vladimir-putin-visits-cairo-1487412>